

CATRA

MENGAYOMI & MENCERDASKAN

MAJALAH WANTANNAS RI

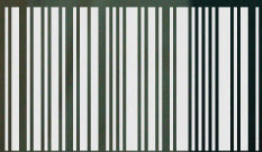


EDISI XXXIX

**JOKOWI:
"WTP BUKAN
PRESTASI TAPI
KEWAJIBAN"**



**NAHKKODA BARU
SETJEN WANTANNAS RI**



HAPPY PANCASILA DAY



Salam Wantannas RI,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga majalah Catra edisi XXXIX/2024 dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Majalah ini merupakan bentuk penyampaian informasi, pengetahuan maupun wawasan.

Tim Redaksi Majalah Catra terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan yang disajikan dalam berbagai rubrik. Diharapkan berbagai sajian informasi dalam Majalah Catra ini dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Sejalan dengan itu, artikel yang disajikan pada penerbitan majalah Catra edisi XXXIX/2024 ini dengan topik utama yaitu Nahkoda Baru Setjen Wantannas RI Laksdya TNI T.S.N Hutabarat. Pada rubrik Info Kita ada Wanannas RI Tinjau Babel, Jokowi: WTP bukan prestasi tapi kewajiban, Wantannas RI gelar Pelatihan Manajemn Kebakaran, serta Wantannas RI Dukung SCRC Pengolahan Sampah. Dalam rubrik Opini membahas Urgensi Percepatan Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Untuk Melindungi Masyarakat Pengguna Internet serta Kurikulum Merdeka Untuk Ketahanan Pendidikan Nasional (Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik).

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Catra masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya.

Pelindung: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S; Penanggung Jawab: Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Elphis Rudy, M.M., M.S.S.; Redaktur: Kolonel Cba Edwar Rizal, S.Sos., Penyunting/ Editor: Desi Fajar Nita, S. Sos., Natalina Pakpahan, S.I.Kom; Desain Grafis: Riza Savitri, A.Md., Fauziah Nurunnajmi, S.E Fotografer: Yayat Ruhiat, A.Md, Kiswanto Redaksi: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat – 10110, Telp. 0213863983 Fax 021-3441683, email: dangmas@wantannas.go.id; dangmaswantannas@gmail.com;

DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA :

- Setjen Wantannas Resmi Dipimpin Nahkoda Baru Laksdya TNI T.S.N Hutabarat.....4

INFO KITA :

- Wanannas RI Tinjau Babel.....8
- Jokowi: WTP bukan prestasi tapi kewajiban an.....12
- Wantannas RI gelar Pelatihan Manajemn Kebakaran.....14
- Wantannas RI Dukung SCRC Pengolahan Sampah16
- Wantannas RI Peroleh Predikat WTP yang ke-17 kali berturut-turut25

OPINI :

- Urgensi Percepatan Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi Masyarakat pengguna internet18
- Kurikulum Merdeka Untuk Ketahanan Pendidikan Nasional (Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik)22
- Makna dan Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam Perpekstif Filsafat Hukum Jilid 1.....18

KEBIJAKAN PEMERINTAH :

- UU Kesejahteraan Ibu dan Anak di sahkan.....26

TAHUKAH ANDA :

- 10 Tempat Menakutkan di Dunia.....28
- ANegara - Negara Yang Tidak Puna Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia30

Inspirasi Bulan Ini



Hobi yang Membuat Kamu Panjang Umur

Berolahraga

Kamu bisa memilih olahraga mudah dan murah yaitu berlari. Olahraga aerobik ini akan mengoptimalkan kinerja jantung. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa berlari selama satu jam setiap minggu, bisa menambah usia Kamu lebih panjang tujuh jam. Orang yang rutin berlari, memiliki peluang 25-40 % untuk hidup tiga tahun lebih lama.

Tidur Cukup

Orang harus tidur 7-8 jam setiap malam akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Kurang tidur adalah penyebab semua jenis masalah kesehatan, mulai dari obesitas, penyakit jantung, hingga depresi. Dampak jangka panjangnya, Andapun berpeluang hidup lebih lama.

Sering-seringlah Bercanda

Tertawa, mungkin adalah obat penghilang stres terbaik untuk membantu kita berumur panjang. Sebuah studi terkini dari Norwegia menyimpulkan, tertawa merupakan aktivitas fisik yang bisa diandalkan untuk mengurangi kekakuan arteri dan meningkatkan kesehatan jantung.

Kelola Stres

Sebuah penelitian dari University of California menemukan bahwa wanita yang mengalami stres kronis akan memiliki tingkat hormon yang menghambat proses penuaan lebih rendah. Studi lain melaporkan, stres juga sangat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke.

Makan lebih banyak ikan

Makan ikan setidaknya dua kali seminggu dapat memenuhi kebutuhan asam lemak omega-3 EPA dan DHA. Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa orang yang sering makan ikan, akan memiliki tingkat asam lemak sehat yang lebih tinggi dalam tubuhnya. Ini tidak hanya bisa membuat mereka lebih berpotensi 27 persen untuk berumur panjang, tetapi juga memiliki risiko 35 persen lebih rendah untuk terkena penyakit jantung.



NAHKODA BARU SETJEN WANTANNAS RI Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat

Oleh : Farandy Purba, S.Sos.,

Laksdya TNI T.S.N.B. Hutabarat secara resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas RI menggantikan Laksdya TNI Dadi Hartanto usai dilantik Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto di Ruang Parikesit, Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (25/4).

Pengangkatan Sesjen Wantannas ini tertuang dalam dasar pengangkatan Keppres Nomor 16/ TPA Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024.

“Atas perkenan Bapak Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional, saya menyampaikan ucapan selamataat

kepada saudara Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., beserta Ibu,” ucap Menkopolhukam dalam sambutannya.

Lebih lanjut ia berpesan agar amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Sesjen yang baru dilantik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan bekal pengetahuan, serta pengalaman penugasan di berbagai wilayah pengabdian, pihaknya yakin Sesjen baru mampu melaksanakan tugas memimpin organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan sebaik-baiknya dan bekerja dengan penuh dedikasi.

Tak lupa Menkopolhukam juga mengucapkan terima kasih Laksdya TNI Dadi Hartanto atas pengabdian, dedikasi, dan loyalitas yang telah diberikan selama mengemban jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI. Ia berharap Laksdya TNI Dadi Hartanto dapat terus melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara pada wilayah pengabdian lainnya.

Pada kesempatan ini Menko juga menyampaikan bahwa Lembaga Dewan Ketahanan Nasional telah melalui rentang sejarah yang sangat panjang, dimulai dengan pembentukan Dewan Pertahanan Negara (Wanhanneg) pada tahun 1946 untuk menghadapi Agresi Militer Belanda. Selanjutnya berubah menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) pada tahun 1954 untuk menghadapi gejolak dalam negeri, berubah menjadi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) pada tahun 1970, dan menjadi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebagaimana yang dikenal sekarang berdasarkan Keppres Nomor 101 Tahun 1999.

“Jejak sejarah tersebut membuktikan, bahwa organisasi Wantannas RI sejatinya merupakan organisasi yang berperan sangat vital dalam mengawal keberlangsungan Negara Republik Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang. Wantannas telah mengalami berbagai metamorphosis dalam hal peran dan fungsinya, menyesuaikan dengan perkembangan kepentingan nasional. Saat ini tugas Wantannas adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia,” jelasnya.

Gelar Entry Briefing

Tak lama setelah menjabat Sesjen Wantannas, Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh personel Setjen Wantannas RI melalui kegiatan Entry Briefing yang berlangsung di kantor Setjen Wantannas RI, pada Selasa (30/4).

Pertama, Sesjen Hutabarat meminta kepada seluruh pegawai Wantannas RI untuk menjadikan etika dan disiplin sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing. Etika yang dimaksud seperti mengucapkan salam, terima kasih, komunikatif, serta tidak bergunjing di lingkungan pekerjaan. “Etika ini sangat penting, moral bukan sekedar slogan. Tata krama bukan berarti primordial, disiplin bukan berarti militerisme,” terang Sesjen.

Kedua, ia menekankan untuk peningkatan dan penyegaran suasana kerja di lingkungan Setjen Wantannas, yang tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan kerja Wantannas RI.

“Jangan menempatkan diri kita terlalu tinggi, karena akan membuat kita menjadi tidak adaptif. Sebaliknya jangan kita terlalu rendah, karena akan membuat kita menjadi tidak kreatif,” ucapnya.

Selanjutnya Sesjen juga berharap agar bekerja dengan program yang berkelanjutan (sustainable) yaitu melanjutkan program dengan kinerja yang telah baik, memperbaiki program kerja yang mengalami kendala dan meningkatkan kinerja saat ini, serta melakukan program kerja yang belum terlaksana.

“Silahkan dicamkan, selanjutnya tiap personel atau bagian agar menindak lanjuti sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya. Ia juga mengingatkan kepada seluruh personil terkait visi Wantannas RI kedepan, seperti terwujudnya Lembaga Dewan Keamanan Nasional, dan peningkatan bobot atau peran Wantannas. Kemudian pengembangan sarana media untuk menaikkan branding Wantannas di mata publik.

Sebagai penutup, Sesjen mengajak pegawai Wantannas RI untuk berfikir dengan pola pikir berkembang (growth mindset) yang antara lain adalah tidak insecure dengan capaian orang lain, terus belajar setiap hari, menerima masukan, mengutamakan proses, melihat kegagalan sebagai pembelajaran, siap menerima tantangan, berani mencoba, yakin bisa berkembang, percaya diri dapat mencapai goal, dan yang terakhir adalah tidak menyalahkan kondisi lingkungan.

“Ini yang harus kita ubah, buat kita semua. Ini yang harus kita laksanakan, mudah mudahan kita bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Penguatan Visi Menjadi Dewan Keamanan Nasional RI

Wantannas RI memiliki peran yang strategis dalam membangun dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Salah satu pendekatan kunci yang digunakan Wantannas RI adalah melalui kegiatan silaturahmi yang intens dengan berbagai pihak. Silaturahmi ini tidak hanya bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal, tetapi juga untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya menggapai visi Wantannas RI menjadi Wankamnas RI (Dewan Keamanan Nasional).

Salah satu upaya Sesjen Wantannas RI untuk mencapai cita-cita tersebut adalah memberikan kuliah umum kepada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lemhanas RI. Dalam kesempatan tersebut Sesjen Wantannas menyampaikan materi yang berjudul ‘Keamanan Nasional & Permasalahannya’.

“Sebuah topik yang sangat krusial dan relevan bagi kita semua. Mengingat tantangan yang semakin kompleks dan dinamis di era globalisasi dan teknologi ini, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan implementasi keamanan nasional men-

jadi suatu keharusan,” ucap Sesjen, Senin (1/7).

Beberapa topik seperti Wantannas RI dan Sejarah Pembentukannya, Pengertian Kamnas, Siskamnas, dan Tata kelola Siskamnas, Sistem Keamanan Nasional Beberapa Negara, Indikator yang Mempengaruhi Keamanan Nasional, dan Dinamika dalam Upaya Membangun Tata kelola Siskamnas di Indonesia, disampaikan Sesjen agar para peserta pendidikan memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif serta strategi yang lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional Indonesia.

Sesjen Wantannas RI mengungkapkan, sejauh ini masih terjadi dinamika dalam upaya membangun tata kelola siskamnas di Indonesia. Negara sebenarnya sudah memiliki konsep dasar keamanan nasional sebagaimana terdapat dalam penjelasan UU No.17/ 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi :

“Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan NKRI yg menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman”. Keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi kamtibmas, dimensi kamdagri, dan dimensi pertahanan”.

Dengan melihat pengertian keamanan nasional ini, berarti sebenarnya negara sudah memiliki konsep keamanan nasional yang bersifat komprehensif. Namun konsep diatas belum dijabarkan dalam sebuah sistem keamanan nasional dalam bentuk Undang Undang Keamanan Nasional yang isinya mengatur tentang tata kelola sistem keamanan nasional.

Dijelaskan salah satu penyebab Indonesia belum memiliki UU Keamanan Nasional dan Dewan Keamanan Nasional adalah masih belum terjadinya kesamaan persepsi beberapa pihak tentang apa yang dimaksud dengan sistem keamanan nasional. RUU Keamanan Nasional sendiri sudah pernah digagas namun sampai saat ini belum sampai menjadi UU.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai cita cita tersebut seperti diantaranya harus menumbuhkan jiwa kenegarawanan dari berbagai pihak untuk mengedepankan kepentingan nasional dari pada ego sektoral dalam merumuskan draft RUU Kamnas dan Dewan Keamanan Nasional. Kedua, konsep RUU Kamnas dan Dewan Keamanan Nasional harus berlandaskan konsep terkini yaitu keamanan nasional yang bersifat komprehensif, dimana ancaman terhadap Kamnas sudah multidimensi terdiri dari militer, hibrida dan non militer. Ketiga, pembuatan konsep draft RUU dan Dewan

Keamanan Nasional harus bersifat kolaboratif berbagai pihak yang terkait.

Profil Laskdya TNI T.S.N.B Hutabarat

TSNB Hutabarat yang lebih akrab disapa Cokky Hutabarat merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke- XXXV/ tahun 1989. Lahir di Jakarta, 11 Desember 1967, Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat merupakan Pati TNI AL yang cukup cemerlang dan berprestasi. Dia memiliki rekam jejak yang sangat bagus selama mengabdikan di militer.

Sejumlah jabatan strategis pernah diemban lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dari satuan Korps Pelaut ini. Di antaranya, Komandan KRI Siribua, kemudian Palaksa KRI Sultan Thaha Syaifudin-367, dan Komandan Teluk Cirebon-543. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Karel Satsuit Tubun-356. Setelah menjabat sebagai komandan kapal perang, Hutabarat menduduki jabatan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Bengkulu. Kemudian menjabat sebagai Asops Danlantamal III/ Jakarta.

Dari Jakarta, dia dipercaya menduduki jabatan sebagai Padiklat pada proyek pengadaan KRI dr. Soeharso (SHS) di Korea Selatan (Korsel). Kemudian menjadi Asops Danguspurlabar dan Dankolat Koarmabar. Dedikasi dan loyalitas Hutabarat saat menjalankan tugas membawanya masuk ke dalam lingkaran Istana. Hutabarat kemudian dipercaya menjadi Ajudan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua tahun sejak 2012 hingga 2014.

Karier militernya terus meningkat, dia kemudian diangkat menjadi Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlabar) sekarang bernama Koarmada I. Selanjutnya menjabat sebagai Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Wadanseskoal). Dari situ, Hutabarat kemudian diangkat menjadi Kaskoarmada I kemudian Deputi Bidang Opstat Bakamla. Selanjutnya dia dipercaya menjadi Koordinator KSAI.

Tidak hanya itu, jabatan strategis lainnya yang pernah diemban Hutabarat adalah sebagai Pangkoarmada II yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Saat menjabat sebagai Pangkoarmada II, Laksda TNI Cokky panggilan akrabnya dipercaya menjadi Satuan Tugas Laut (Satgasla) yang menjamin keamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dari sektor laut. Sebanyak 14 kapal perang canggih memagari laut seperti perisai yang melindungi pantai Hotel Apurva Nusa Dua Bali, tempat para pemimpin negara dan organisasi dunia bertemu.

Bukan hanya kapal perang kelas Frigate dan Corvet dengan segala senjata dan peralatan canggihnya, tapi Kapal Latih Layar KRI Bima Suci



juga melengkapi jajaran kapal yang menjadi perhatian para peserta G20. Selepas memimpin Koarmada II, Hutabarat kemudian diangkat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas sebelum akhirnya diangkat menjadi Sesjen Wantannas.

Pendidikan

Dalam bidang akademisi, Hutabarat juga merupakan perwira TNI AL yang sangat berprestasi dan banyak mengikuti pendidikan di luar negeri. Berbagai pendidikan militer dan umum pernah dilaluinya. Pendidikan militer yang pernah dijalaninya antara lain Akademi Angkatan Laut (AAL) pada 1989, Dikspespa Arteleri, Diklapa II Koum Angkatan-13, Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) dan Sekolah Staff dan Komando (Sesko) TNI pada 2012.

Dia juga pernah mengikuti pendidikan militer di luar negeri seperti Principal Warfare Officer Course, Royal Navy, Inggris. Kemudian Anti Submarine Warfare Course, Royal Navy, Australian Command and Staff Course. Termasuk Maritime Component Commander Course di Pearl Harbor Hawaii. Sedangkan untuk pendidikan umum, menyabet gelar Doktor bidang Strategik Manajemen dari Sekolah Bisnis, IPB University, Indonesia, Systemic Strategic Thinking Management and Planning Course, Naval Post Graduate School, Amerika Serikat. Selain itu, International Security Studies Course, G.C. Marshal CSS, Garmisch, Germany. Meraih gelar Magister S2 Maritime Studies, University of Wollongong, Australia. Termasuk lulusan S-2 Strategi dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia. Serta S1 - Defense Studies, University of New South Wales, Australia.

WANTANNAS RI TINJAU BABEL

Oleh : Yuliani Simbolon, S.I.Kom.,



Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran, kantor WALHI Kepulauan Bangka Belitung dan kantor Perwakilan Nelayan.

Seperti yang masyarakat ketahui bahwa Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dan keberadaan timah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar penghasil timah dunia. Berdasarkan laporan United States Geological Survey (USGS) Tahun 2023, Indonesia masuk jajaran penghasil timah terbesar global yaitu peringkat tiga dunia setelah China dan Myanmar.

Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk melihat langsung dampak penambangan timah ilegal terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penambangan timah liar sungguh merugikan masyarakat sekitar yang tinggal di daerah penambangan. Proses penambangan timah menyebabkan pencemaran udara yang signifikan. Debu dan partikel halus dari kegiatan penambangan terbawa angin dan tersebar ke lingkungan sekitarnya. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan bagi

penduduk sekitar.

Tidak hanya itu saja penambangan timah ilegal Seringkali mengakibatkan hutan-hutan yang berfungsi sebagai habitat alami bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan dihancurkan untuk memberi jalan bagi aktivitas penambangan. Berbagai macam kerugian yang terjadi akibat penambangan timah ilegal. Bukan hanya manusia saja yang dirugikan, namun hewan serta tumbuhan terkena imbas akibat penambangan timah ilegal ini.

Setelah melakukan kunjungan kerja selama empat hari di Provinsi Bangka Belitung, Wantannas RI telah menemukan penyebab terjadinya penambangan timah ilegal juga solusi yang nantinya akan Wantannas RI rekomendasikan melalui kunjungan kerja ini dan Wantannas RI berharap pemerintah pusa t dapat bekerjasama dengan Wantannas RI karena Bangka Belitung harus bebas dari penambangan timah ilegal supaya masyarakat sekitar merasa aman, nyaman dan sejahtera serta keberlangsungan hidup yang tanpa cemar.***(ys)

Mendengar kata Timah, pasti membawa pembaca pada kasus dugaan korupsi yang baru-baru ini menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai 300T. Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Kejagung, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) RI Laksamana

Madya TNI Dr. T.S.N.B Hutabarat M.M.S, bersama Unit Kedepuitan Bidang Pengkajian dan Penginderaan berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka kunjungan kerja, Senin, (27/05/2024).

Lokasi yang dituju diantaranya kantor Kapolda Bangka Belitung, kantor Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kantor Direksi PT Timah, kantor Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran, kantor Kepala Dinas LHK



WANTANNAS RI BAHAS MITIGASI KARHUTLA DI SUMATERA SELATAN

Oleh : Mutiara Saraswati, S.I.Kom.,

Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) yang diwakili oleh Kedeputusan Sistem Nasional (Sisnas) melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan pada tanggal 26 - 28 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas strategi kolaborasi mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis.

Wantannas RI memandang penting untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menanggulangi Karhutla, termasuk dengan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang. Dalam

pertemuan di Lanud SMH, Deputy Bidang Sisnas Wantannas RI Mayjen TNI Syachrial E. Siregar menyampaikan apresiasi atas kesiapsiagaan Lanud SMH beserta jajarannya dalam penanganan Karhutla.

Selain itu Kedeputusan Sisnas juga lakukan kunjungan ke Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada 27 Juni 2024 untuk meninjau lokasi Selat Kanal dan Paludikultur di lahan gambut sebagai bagian dari upaya mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan. Selat Kanal merupakan kanal air yang dibuat di tengah lahan gambut untuk membantu menjaga tata air dan mencegah terjadinya Karhutla. Sedangkan Paludikultur adalah sistem pertanian yang dilakukan di lahan basah atau rawa gambut.

Deputi Sisnas, Mayjen TNI Syachrial E. Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa Wantannas RI sangat mendukung pengembangan Selat Kanal dan Paludikultur sebagai salah satu solusi untuk mengatasi Karhutla di Sumatera Selatan.

Wantannas RI juga mengunjungi Pangdam II SWJ, bertemu dengan Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si, M.Tr (Han) dan Brigjen Tni Norman Saito membahas strategi untuk berkolaborasi penanganan Karhutla.

Kunjungan kerja Wantannas RI ini juga menjadi bagian dari Kajian Daerah untuk Penguatan Ketahanan Nasional yang dilakukan oleh Wantannas RI. Dalam kajian ini, Wantannas RI akan memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait dengan strategi kolaborasi mitigasi Karhutla di Sumatera Selatan.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam kunjungan kerja Wantannas RI di Sumatera Selatan antara lain:

- Pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam penanganan Karhutla, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan sektor swasta.
- Peningkatan upaya pencegahan Karhutla melalui edukasi masyarakat, penegakan hukum, dan pengembangan teknologi.



- Penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan Karhutla, termasuk dengan meningkatkan jumlah personel dan peralatan pemadam kebakaran.

Dengan demikian, kunjungan Wantannas RI ke Sumatera Selatan bukan hanya menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antarlembaga, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh melalui partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Wantannas RI berharap bahwa dengan adanya kolaborasi yang kuat dan strategi yang tepat, Karhutla di Sumatera Selatan dapat diatasi secara efektif dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis, terutama dalam menghadapi perubahan iklim yang dapat memperparah Karhutla. (ms)





JOKOWI : WTP BUKAN PRESTASI, TAPI KEWAJIBAN

Oleh : Mutiara Saraswati, S.I.Kom.,

Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ‘terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023. Hasil ini diumumkan saat Penyampaian LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 oleh BPK di Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

Penyampaian laporan dilakukan oleh ketua BPK, Isma Yaton kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa

setiap tahun ini pasti diaudit pasti diperiksa,” tegas Jokowi dalam sambutannya.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Predikat ini menjadi indikator akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Pencapaian WTP seringkali digembar-gemborkan sebagai prestasi membanggakan bagi pemerintah pusat daerah. Namun, di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan kritis: Apakah predikat WTP benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel, ataukah hanya formalitas semata?

Memiliki predikat WTP bukan berarti bebas dari temuan audit. BPK tetap menemukan potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, na-

mun temuan tersebut dinilai tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dengan kata lain, WTP menunjukkan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan. Presiden Jokowi juga membahas mengenai ekonomi Indonesia yang stabil, tumbuh di atas 5% dan inflasi tetap terjaga atas kerjasama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Oleh karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” tambah Presiden Jokowi.

LHP ini merupakan wujud komitmen pemerintah atas pelaksanaan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam bentuk LKPP. Ketua BPK Isma Yaton menyatakan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sejak diberlakukannya undang-undang tersebut.

“Saya sependapat, jadi harusnya kita menjadikan bekerja dengan baik itu sebagai sebuah kewajiban. Dengan demikian Wantannas pun memiliki kewajiban melakukan hal tersebut sesuai arahan presiden”



INFO KITA

Sesjen Wantannas Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat pada kesempatan ini mendukung pernyataan Presiden Jokowi terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan sebuah prestasi melainkan sebuah kewajiban. “Saya sependapat, jadi harusnya kita menjadikan bekerja dengan baik itu sebagai sebuah kewajiban. Dengan demikian Wantannas pun memiliki kewajiban melakukan hal tersebut sesuai arahan presiden,” imbuhnya.

Predikat WTP patut diapresiasi, namun bukan hasil akhir. Upaya menuju pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel harus berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan membangun budaya akuntabilitas di semua tingkatan. Masyarakat pun harus terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif agar pengelolaan keuangan publik dapat berjalan secara optimal dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ms)





Wantannas RI Gelar Pelatihan Manajemen Kebakaran

Oleh: Farandy Purba, S.Sos.,

Kemampuan Manajemen kebakaran memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan dari bahaya kebakaran. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan responsibilitas, pelatihan pemadam kebakaran menjadi hal krusial. Pelatihan ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis dalam pemadaman api, tetapi juga mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi situasi darurat yang berpotensi mematikan. Dengan pelatihan yang terstruktur dan intensif, diharapkan para individu dapat lebih siap dan mampu menyelamatkan nyawa serta harta benda dengan tepat dan efisien saat kebakaran terjadi.

Memperhatikan hal tersebut, Wantannas RI kali ini memberikan pelatihan pemadam kebakaran bagi pegawai dengan melibatkan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dilaksanakan di kantor Wantannas RI pada, Jumat

(12/7).

Kepala Biro Umum Wantannas RI Laksma TNI Imam Hidayat pada kesempatan tersebut menyampaikan, pelatihan ini merupakan rangkaian pelatihan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang diwajibkan untuk diikuti oleh pegawai Wantannas RI. "Hari ini kita melaksanakan latihan pemadaman kebakaran. Nanti ada mungkin berlanjut next time adalah bagaimana latihan pencegahan kebakaran. Intinya ini adalah pertama kali kita melaksanakan latihan pemadaman kebakaran," ujarnya.

Ia melanjutkan, pelatihan ini penting karena pihaknya melihat pada saat melaksanakan simulasi kebakaran secara mandiri, sebagian besar pegawai tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran di lingkungan kerja.

Di sisi lain ia mengingatkan bahwa di gedung Wantannas RI terdapat sebuah ruang server



yang memiliki banyak arus kelistrikan, dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan bencana kebakaran. Oleh karena itu ia meminta kepada pegawai agar dapat mengikuti pelatihan manajemen kebakaran dengan baik.

"Tolong diperhatikan dengan benar, kemudian jaga kesehatan masing masing, anggap latihan ini happy, tapi tetap serius fokus sehingga nanti ini menjadi bekal," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan Sudin Gulkarmat Jakpus Marwono menjelaskan, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan diri apabila terjadi suatu kebakaran maka telah terbentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sehingga pihak pengelola gedung memahami apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kebakaran lebih besar.

"Harapan saya kedepan mereka yang kita bentuk hari ini benar benar sudah mengetahui sejauh mana mereka bertanggung jawab atas tugasnya masing masing. Karena terus terang saja kebakaran itu tidak bisa diprediksi terjadinya, maka kalau pihak gedung sudah siap siaga maka apapun kita hadapi akan enjoy dan bisa diminimalisir harta benda dari kerugian lebih besar," terang Marwono.

Ia menuturkan pelatihan ini akan berkelanjutan untuk semakin mematangkan



INFO KITA

pegawai Wantannas RI dalam menghadapi kebakaran dan berikutnya lebih kearah pelatihan penyelamatan aset aset yang ada di gedung Wantannas RI. "Kita punya schedule ke depan karena ini adalah gedung Dewan Ketahanan Nasional yang benar benar harus sebagai contoh yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, pelatihan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang berlangsung di area kantor Wantannas RI ini diisi dengan pemberian materi yang antara lain, teori api,

simulasi berupa penyuluhan dan visualisasi pencegahan kebakaran, sarana evakuasi, sistem evakuasi kebakaran, dan hal penting lainnya yang diharapkan setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan mampu memahami tentang pengertian manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Memahami tentang sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung yang harus dilakukan baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadi kebakaran, memahami tentang setruktur organisasi, tugas dan fungsi peran kebakaran, dan memahami tentang prosedur yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran. (Humas/ FP).



WANTANNAS RI DUKUNG SCRC PENGOLAHAN SAMPAH

Oleh : Yuliani Simbolon, S.I.Kom.,

Sampah menjadi sesuatu yang amat sangat dihindari oleh masyarakat pada umumnya. Sampah yang tidak diolah akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar. Bukan hanya manusia yang terdampak dari sampah yang tidak dapat diolah, hewan dan tumbuhan juga turut terkena dampak dari sampah yang tidak bisa diolah.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Beberapa masyarakat masih belum mengetahui cara mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) jumlah sampah yang hadir sebesar 33.22.201,80 ton/tahun. Sedangkan data per capaian 2020 sampah yang terkelola hanya dalam angka 59.11%, artinya masih terdapat 40.89% atau senilai dengan 13.626.096,58 ton

sampah yang tidak terkelola. Tentunya sampah yang tidak dapat dikelola ini akan menyebabkan bencana alam yang nantinya akan mengganggu dan merusak lingkungan sekitar serta menurunnya kesehatan masyarakat karena adanya kumpulan sampah.

Wantannas RI melalui kedeputian Sistem Nasional melakukan kunjungan kerja ke Sentul City Recycle Center (SCRC) Bank Sampah Induk (BSI) "BENTENG KREASI" Tempat Pengelolaan Sampah (TPS-3R) & Pusat Daur Ulang, Kabupaten Bogor. Adapun dilaksanakannya kunjungan ini sebagai dukungan dari Wantannas RI dalam menangani gundukan sampah yang tidak kunjung selesai, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Sentul City Recycle Center memiliki dua

teknologi tepat guna yakni *NatureXa Biotechno* yakni mesin pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna dan *NatureXa Bioaktivator* untuk mengolah sampah menggunakan mikro biologi. Untuk jenis-jenis mesin yang dioperasikan antara lain mesin pengomposan, mesin pakan ternak, mesin pengolah plastik dan mesin-mesin lain yang sesuai dengan jenis sampahnya.

SCRC ini dibentuk dengan tujuan untuk mencegah terjadinya potensi banjir, rusaknya keindahan lingkungan, menurunnya kesehatan masyarakat karena gundukan sampah dapat memicu perkembangan lalat serta bakteri lainnya. Perwujudan SCRC sebagai tujuan awal tagline Sentul City yaitu, 'Menuju Sentul City Zero Waste 2020'. Pihak SCRC dibantu oleh PT. Xaviera Global Sinergi (XGS) dalam proses pemilahan sampah.

Melalui inovasi ini jumlah sampah yang masuk ke TPA tentunya semakin berkurang bahkan diharapkan tidak ada lagi, maka sebagian permasalahan sampah bisa selesai. Selain itu SCRC juga dapat mengurangi emisi karbon.

Wantannas RI berharap *Recycle Center* ini dimiliki juga oleh daerah lain supaya sampah-sampah yang menunggong dapat diolah semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi daerah yang mengalami pencemaran udara yang diakibatkan oleh sampah.





URGENSI PERCEPATAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT PENGGUNA INTERNET

Oleh : Kolonel Laut (P) R. Firman Noegraha W., M.Sc.

Pada era digitalisasi seperti sekarang, aktivitas manusia telah dipermudah dengan adanya teknologi dengan fitur yang semakin canggih setiap harinya. Hal ini membuat sedikit demi sedikit aspek kegiatan manusia beralih pada sistem digital. Tentu saja hal ini memberikan banyak dampak positif. Contoh kecilnya adalah munculnya inovasi ojek online, *e-commerce*, dan dompet digital yang memberikan efektivitas dan efisiensi besar bagi setiap orang.

Penggunaan sistem digital semakin meningkat secara dramatis saat virus Covid-19 mulai mewabah hingga ditetapkan sebagai pandemi. Demi memutus rantai penyebaran virus, pemerintah menetapkan beberapa aturan baru yang melibatkan jaringan internet dalam pelaksanaannya seperti *Work From Home (WFH)*, *School From Home*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termasuk Transaksi Keuangan dan Konektivitas dengan manusia lain. Kebijakan-kebijakan tersebut berakibat pada pergeseran sebagian besar aspek kehidupan individu ke dalam digitalisasi. Pergeseran tersebut meningkat secara drastis, demikian juga meningkatnya ketergantungan pada jaringan internet.

Di samping aspek disruptif perkembangan

teknologi informasi ini memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, perekonomian, dan pengetahuan, namun juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan data pribadi, pencurian data, penjualan data pribadi, dan penipuan. Kejahatan siber, yang mencakup penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan berbagai kejahatan, seperti pinjaman online, pembobolan rekening lewat ATM, pelecehan seksual via chatting, dan konten ilegal lainnya, hal hal tersebut menjadi ancaman serius di era digital 6.

Dengan semakin meningkatnya kejahatan di dunia maya terutama penyalahgunaan data pribadi, maka pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengguna internet dengan meningkatkan keamanan digital dan mengatur perlindungan data pribadi melalui aturan hukum dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang ITE Perubahan Kedua atas Undang-undang No 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 8.

Namun masih ada tantangan dalam menjalankan dan memastikan perlindungan data prib-

adi, terutama terhadap penyalahgunaan data oleh pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik yang dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data 37.

Tujuan dan manfaat dari artikel ini adalah untuk menyoroti urgensi pengesahan dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, serta mengeksplorasi tantangan dan solusi yang diperlukan untuk mencapai perlindungan data pribadi yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk:

- Mengedukasi pembaca tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital dan bagaimana UU PDP dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut.
- Menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU PDP, termasuk keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam pengawasan, dan ketidakpercayaan masyarakat.
- Menyediakan saran dan rekomendasi konkret untuk pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang UU PDP, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat penerapan UU PDP.

Manfaat dari artikel ini meliputi:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana UU PDP dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut.
- Memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU PDP dan bagaimana mengatasinya.
- Menyediakan solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk mempercepat penerapan UU PDP dan meningkatkan perlindungan data pribadi.

Artikel ini juga menekankan pentingnya komitmen politik dan anggaran besar dari pemerintah dan DPR untuk membangun lembaga otoritas yang independen yang dapat melindungi data pribadi 270 juta penduduk Indonesia, yang bernilai mahal dan strategis 1. Selain itu, artikel ini juga menyoroti bahwa UU PDP dapat dimaknai sebagai perwujudan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi khususnya di era digital.

KONDISI SAAT INI

Dalam era digital saat ini, penggunaan internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, dengan kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan internet, isu perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Analisis kondisi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna internet dihadapkan pada berbagai

tantangan dalam melindungi data pribadi mereka.

Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketakutan terhadap privasi mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebiasaan online mereka. Misalnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hampir 70% pengguna internet merasa tidak aman saat berbagi informasi pribadi di media sosial, dan hanya 30% yang merasa aman 2.

Kebocoran data pribadi juga menjadi masalah serius. Dalam beberapa kasus, data pribadi pengguna internet telah disalahgunakan oleh pihak ketiga, yang mengakibatkan kerugian finansial dan psikologis bagi korban. Misalnya, dalam serangkaian kebocoran data yang terjadi pada tahun 2021, lebih dari 1 miliar catatan pribadi terungkap, mencakup informasi seperti nama, alamat, dan nomor telepon 3.

Selain itu, ada juga tantangan dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Meskipun UU PDP telah dibentuk untuk melindungi data pribadi warga, implementasinya masih jauh dari ideal. Beberapa alasan utama meliputi kurangnya pemahaman tentang UU PDP oleh masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian 4. Dengan demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa ada urgensi yang sangat tinggi untuk mempercepat penerapan UU PDP dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Melalui pemahaman yang lebih baik dan penerapan yang lebih efektif dari UU PDP, kita dapat membantu melindungi masyarakat pengguna internet dari ancaman yang terus berkembang.

URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam dunia yang semakin digital dan terhubung, perlindungan data pribadi menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Di era informasi, data pribadi menjadi aset yang berharga, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan baik, seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, pengembangan layanan yang lebih personal, maupun untuk keuntungan finansial. Namun, dengan kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan internet, risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data tersebut juga meningkat.

Urgensi perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena beberapa alasan utama:

- Peningkatan Ancaman: Dengan kemajuan teknologi, ancaman terhadap data pribadi menjadi semakin kompleks. Ancaman seperti phishing, malware, dan ransomware menjadi semakin



dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang berbagi informasi pribadi di internet.

TANTANGAN DALAM PENERAPAN UU PDP

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam pengawasan, hingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas perlindungan data pribadi.

Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah dan lembaga pengawas menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan teknologi, yang semuanya diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap penggunaan data pribadi. Keterbatasan ini sering kali menghambat upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi warga. Kesulitan dalam Pengawasan: Pengawasan terhadap penggunaan data pribadi oleh perusahaan dan organisasi yang beroperasi di internet menjadi tantangan yang sulit. Hal ini disebabkan oleh perubahan cepat dalam teknologi dan praktik bisnis, serta kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengakses data yang disimpan di server yang tersebar di seluruh dunia.

Ketidakpercayaan Masyarakat: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi yang efektif menjadi tantangan utama. Masyarakat sering kali merasa tidak aman dalam berbagi informasi pribadi di internet, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebiasaan online mereka. Ketidakpercayaan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kasus kebocoran data yang sering terjadi, serta persepsi bahwa UU PDP tidak cukup kuat untuk melindungi data pribadi mereka. Kesadaran yang Rendah: Banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kesadaran yang rendah ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketakutan terhadap privasi mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebiasaan online mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya

bersama dari pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah dan lembaga pengawas harus bekerja sama untuk meningkatkan sumber daya dan kemampuan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan data pribadi. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data mereka dilindungi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang berbagi informasi pribadi di internet.

SOLUSI DAN REKOMENDASI

Untuk Pemerintah:

- **Peningkatan Sumber Daya:** Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan data pribadi, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan teknologi.
- **Pelatihan dan Pendidikan:** Mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi lembaga pengawas dan karyawan pemerintah tentang perlindungan data pribadi dan UU PDP.
- **Pengembangan Regulasi:** Mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan efektif untuk melindungi data pribadi, termasuk sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran.

Untuk Masyarakat:

- **Pendidikan dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana UU PDP dapat melindungi mereka.
- **Penggunaan Data Secara Bijaksana:** Mengajarkan masyarakat untuk menggunakan data pribadi secara bijaksana dan hati-hati, serta memahami konsekuensi dari berbagi informasi pribadi di internet.

Sementara itu langkah-langkah Konkret untuk Mempercepat Penerapan UU PDP :

1. **Pengawasan yang Lebih Ketat:** Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan organisasi yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi. Ini termasuk penggunaan teknologi canggih untuk memantau dan memonitor penggunaan data.
2. **Pengembangan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang memadai untuk melindungi data pribadi, termasuk sistem enkripsi dan teknologi keamanan lainnya.
3. **Pelatihan dan Pendidikan:** Mengadakan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana menggunakan internet dengan aman.
4. **Pengembangan Aplikasi dan Layanan yang Menghormati Privasi:** Mendorong pengembangan produk yang menghormati privasi pengguna, termasuk meminta izin sebelum mengumpulkan

- sering terjadi, menimbulkan risiko kebocoran data pribadi yang signifikan.
- **Penggunaan Data untuk Tujuan yang Tidak Diinginkan:** Data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan dan organisasi sering kali digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan oleh pengguna, seperti pemasaran yang tidak relevan, atau penjualan data pribadi kepada pihak ketiga.
- **Ketidakpercayaan Masyarakat:** Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi yang efektif menjadi tantangan utama. Masyarakat sering kali merasa tidak aman dalam berbagi informasi pribadi di internet, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebiasaan online mereka.
- **Kesadaran yang Rendah:** Banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kesadaran yang rendah ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketakutan terhadap privasi mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebiasaan online mereka.

Untuk mengatasi urgensi ini, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama. Pemerintah dan organisasi harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum dan regulasi yang ada dapat dilaksanakan dengan efektif. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data mereka dilindungi, masyarakat

data pribadi dan memberikan pilihan kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan.

5. **Pengadilan yang Adil dan Efektif:** Meningkatkan sistem pengadilan untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap UU PDP dapat ditangani dengan tegas dan adil.

KESIMPULAN

Artikel ini telah membahas secara singkat tentang urgensi perlindungan data pribadi di era digital, khususnya dalam konteks masyarakat pengguna internet di Indonesia. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali merasa tidak aman dalam berbagi informasi pribadi di internet, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di era digital ini, di mana data pribadi menjadi aset yang berharga yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang baik maupun yang buruk. Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih rendah, dan penerapan UU PDP di Indonesia masih jauh dari ideal.

Untuk mengatasi urgensi ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah dan lembaga pengawas harus bekerja sama untuk meningkatkan sumber daya dan kemampuan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan data pribadi. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data mereka dilindungi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang berbagi informasi pribadi di internet.

Dengan mempercepat penerapan UU PDP dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dapat membantu melindungi data pribadi dan memastikan bahwa masyarakat pengguna internet dapat mengakses internet dengan aman dan nyaman. Tidak hanya akan membantu dalam melindungi hak-hak individu, tetapi juga dalam memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan data di tengah tantangan global.

Kurikulum Merdeka



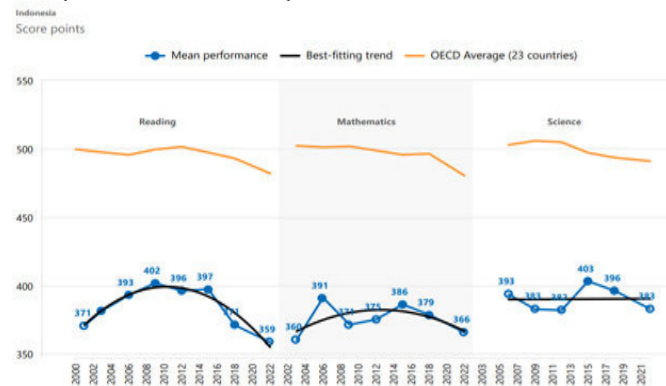
KURIKULUM MERDEKA UNTUK KETAHANAN PENDIDIKAN NASIONAL (Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik)

Oleh: Dr. La Piliha S.Pd., M.Pd.,

A. Pendahuluan

Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam melakukan transformasi pendidikan nasional melalui kebijakan Kurikulum Merdeka mendapatkan reaksi yang pro-kontra dalam masyarakat. Padahal lahirnya kebijakan tersebut di latarbelakangi oleh rendahnya kualitas pendidikan nasional.

Berdasarkan penilaian PISA (Programme for International Student Assessment) di tahun 2022 (Gbr 1), capaian literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik Indonesia secara internasional mengalami penurunan yang signifikan, walaupun penurunan nilai yang dialami Indonesia lebih sedikit dibanding banyak negara lain, sehingga membuah-kan kenaikan posisi kita dalam peringkat internasional (Schleicher, 2023).



Gambar 1. Grafik Hasil PISA dari Tahun 2000-2022
Sumber: OECD PISA Result 2022.

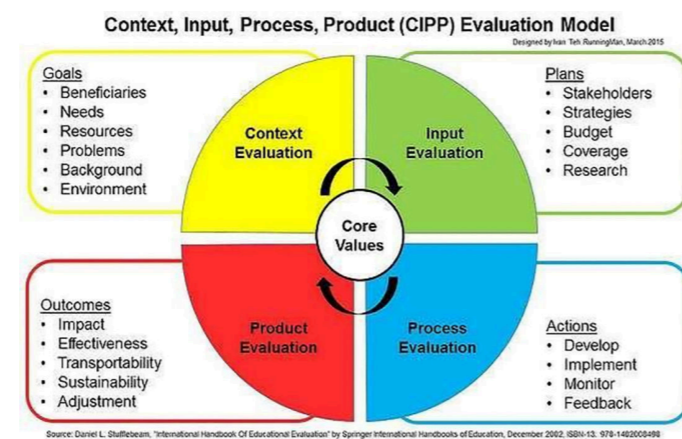
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pembelajaran salah satunya disebabkan oleh desain kurikulum yang memuat

materi yang terlalu padat sehingga guru merasa perlu mengejar ketuntasan materi, dan akibatnya guru tidak memiliki fleksibilitas untuk membantu setiap peserta didik mencapai kompetensi minimum.

Senada yang disampaikan Beatty dan Pritchett (2012), bahwa negara-negara berkembang umumnya terlalu ambisius dalam menentukan target kurikulum tanpa mengindahkan kondisi peserta didik, sehingga kemajuan belajar justru berjalan lambat.

B. Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar

Gambar 2. Model Evaluasi CIPP



Untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia, penulis mencoba lakukan evaluasi kebijakan dengan model CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (Gbr 2). The Joint Committee on Standar for Educational Evaluation, mendefinisikan *evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of an*

object (Stufflebeam & Shinkfield, 2007: 9). Evaluasi adalah penilaian sistematis terhadap nilai atau manfaat suatu objek. Sementara itu, Thomas Dye dalam Parsons (2014: 547) mendefinisikan evaluasi kebijakan adalah pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Kemendikbudristek, berikut kami uraikan proses evaluasi, sbb:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*). Evaluasi tujuan kebijakan Kurikulum Merdeka, sebagai berikut: (a) *Beneficiaries*. Penerima manfaat penerapan kurikulum merdeka adalah agar siswa memiliki keunggulan skill, attitude, dan knowledge sehingga punya life skill (*Human Capital and Human Resources*). Penerima manfaat lainnya adalah dunia usaha untuk kebutuhan high skill labour serta pemerintah terkait kebutuhan teknokrat dan staf pemerintah yang handal untuk mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional; (b) *Needs*. Hadirnya kurikulum merdeka sebagai ikhtiar transformasi dan mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran sehingga kualitas pendidikan nasional sesuai standar internasional; (c) *Resources*. Sumber daya penerapan kurikulum merdeka adalah sumber daya nasional bidang pembangunan pendidikan sesuai amanah UU Sisdiknas; (d) *Problem*. Penerapan kurikulum merdeka sebagai agenda pemecahan terhadap masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia; dan (e) *Environment*. Lingkungan kerja nasional dan global membutuhkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi high skill labour serta punya daya saing global yang handal.
2. Evaluasi Input (*Input Evaluation*). Evaluasi perencanaan kebijakan Kurikulum Merdeka: (a) *Stakeholders*. Proses implementasi kurikulum merdeka belajar melibatkan semua stakeholders pendidikan nasional yakni Pemerintah dan segenap unsur pentahelix; (b) *Strategies*. Siasat

dalam implementasi kebijakan berdasarkan peta jalan dan tata kelola yang handal serta evaluasi berkala; (c) *Budget*. Pendanaan berasal dari APBN 20%, dana masyarakat yang sah serta dana hibah; (d) *Coverage*. Implementasi kurikulum merdeka belajar merupakan kebijakan menyeluruh di semua tingkatan Pendidikan, yakni pada level PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Perguruan Tinggi; (e) *Research*. Kebijakan kurikulum merdeka dilandasi kajian strategis; kajian akademis; dan rekomendasi dari berbagai lembaga riset nasional.

3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*). Evaluasi proses penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka: (a) *Develop*. Kurikulum Merdeka adalah pengembangan kurikulum K-13; (b) *Implement*. Telah dilaksanakan di 14.220 satuan Pendidikan di Indonesia; (c) *Monitor*. Proses monitoring melalui evaluasi dokumen dan evaluasi penerapan kurikulum oleh pihak kementerian Pendidikan Nasional; (d) *Feedback*. Umpan balik terhadap rancangan kurikulum merdeka diperoleh melalui mekanisme monitoring dan evaluasi Program Sekolah Penggerak (PSP).
4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*). Evaluasi hasil kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka: (a) *Impact*. Penerapan kurikulum merdeka mendapatkan persepsi positif dari kepala sekolah dan guru, Hasil survei asesmen nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 97,6% guru setuju dan sangat sebab Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan. 98,6% guru setuju dan sangat setuju bahwa pembelajaran berbasis proyek pada Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan karakter peserta didik; (b) *Effectiveness*. Implementasi Kurikulum Merdeka, efektif membawa perubahan mendasar, yaitu kepala sekolah dan guru merasa mutu proses pembelajaran menjadi lebih baik; (c) *Transportability*. Terjadi transformasi pada dua level, yakni perubahan yang signifikan pada tingkat satuan pendidikan dan perubahan pada tingkat kelas; (d) *Sustainability*. Penerapan kurikulum merdeka sebagai jawaban atas harapan keberlanjutan kualitas Pendidikan nasional; dan (e) *Adjustment*. Penerapan kuri-

MENGENAL MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Kemerdekaan Belajar

"Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai."



Nadiem Anwar Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

kulum merdeka dalam kerangka penyesuaian kualitas pendidikan nasional dengan kualitas pendidikan global era kontemporer (*Society 5.0*) dengan ciri penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI). Dalam Kurikulum Merdeka, Teknologi AI sebagai bagian dari suprastruktur kurikulum.

C. Kurikulum Merdeka untuk Ketahanan Pendidikan Nasional

Ketahanan adalah upaya mengatasi akar penyebab krisis sekaligus memperkuat kapasitas dan sumber daya suatu sistem untuk mengatasi risiko, tekanan, dan guncangan. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia (Lemhannas: 2023), Ketahanan pendidikan nasional dapat dimaknai sebagai filosofis, kultur, dan system pendidikan yang handal sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional sehingga setara dengan negara-negara maju. Mampu melahirkan manusia Indonesia yang memiliki daya saing tinggi dalam kancah global.

Penerapan Kurikulum Merdeka bertujuan mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, sekaligus dapat menjamin ketahanan pendidikan nasional. Idealnya agenda transformasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka selaras dengan agenda transformasi pendidikan di dunia yang direkomendasikan oleh Unesco, dengan tema, sbb: (a) *From the local community to a world society*; (b) *Form social cohesion to democratic participation*; and (c) *From economic growth to human development*, dengan uraian sbb:

1. *From the local community to a world society.*

Kurikulum merdeka dapat mendidik siswa agar mampu bertransformasi dari masyarakat local menjadi masyarakat internasional. Kemampuan adaptasi, interaksi dan daya saing dalam komunitas dunia merupakan kekuatan utama kehidupan era kontemporer.

2. *From social cohesion to democratic participation.* Penerapan Kurikulum merdeka dapat mendidik siswa agar memiliki kohesi social yang kuat, yakni mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam komunitas masyarakat, Selanjutnya bertransformasi sebagai partisipan atau actor demokrasi level daerah dan nasional yang berlandaskan Pancasila.
3. *From economic growth to human development.* Penerapan Kurikulum merdeka untuk menyiapkan siswa agar memiliki life skill sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Giat ekonomi produktif akan berdampak pada upaya pertumbuhan ekonomi kawasan dan nasional. Selanjutnya menjadi actor dalam program-program pembangunan manusia Indonesia yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses ekonomi rakyat, iklim kebebasan dan kemudahan akses politik dalam bingkai demokrasi serta pemenuhan mutlak terhadap hak asasi manusia (*human right*).

D. Penutup

Penerapan Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional serta jaminan ketahanan pendidikan nasional. Diharapkan sejalan dengan agenda transformasi Pendidikan yang direkomendasikan oleh Uneso untuk pendidikan abad-21.



WANTANNAS RI PEROLAH PREDIKAT WTP YANG KE-17

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) RI beserta rombongan menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LHP LKKL) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium BPK, Gatot Subroto, Jakarta, pada Kamis (25/7).

I Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, mengatakan dalam sambutannya mengenai komitmen untuk menjaga hasil pemeriksaan laporan keuangan. "Harapan kami komitmen adalah hal yang utama, bukan hanya sekedar fakta integritas, tetapi terwujud dari langkah kita," jelas I Nyoman.

Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi

Wantannas RI untuk menerima masukan dan rekomendasi dari BPK terkait pengelolaan keuangan lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Titin Mardyaningsih, selaku Kepala Bagian Pengawasan Internal Wantannas RI menekankan pentingnya peranan BPK dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Wantannas RI.

Untuk diketahui bersama, LHP LKKL Tahun 2023 merupakan ke-17 tahun berturut-turut Wantannas RI mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



STRATEGI AS DALAM MENGHADAPI YAMAN MELAKSANAKAN BLOKADELAUT DI LAUT INTERNASIONAL

Oleh : Kolonel Laut (P) Ario Sasongko., S.E., MPM., M.M

Laut Merah merupakan salah satu jalur perdagangan maritim yang penting bagi dunia, karena menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Namun, jalur ini juga menjadi sasaran serangan oleh kelompok pemberontak Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan didukung oleh Iran. Houthi telah melancarkan serangan-serangan dengan menggunakan drone, rudal, dan ranjau laut terhadap kapal-kapal komersial dan militer yang melintasi Laut Merah, terutama yang berasal dari atau menuju ke Israel, sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Serangan-serangan ini mengancam keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan global, serta menimbulkan krisis kemanusiaan di Yaman yang sudah dilanda perang saudara sejak 2014.

Untuk menghadapi ancaman Houthi, AS telah membentuk sebuah koalisi militer internasional yang bertujuan untuk menjaga kebebasan berlayar dan perdagangan di Laut Merah, serta mendukung pemerintah Yaman yang sah yang dipimpin oleh Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi. Koalisi ini terdiri dari beberapa negara sekutu AS, seperti Inggris, Belanda,

Australia, Kanada, dan Bahrain. Koalisi ini telah melakukan operasi-operasi militer, seperti patroli, pengawasan, penghalauan, dan serangan udara terhadap sasaran-sasaran militer Houthi di Yaman. Operasi-operasi ini bertujuan untuk menghancurkan kemampuan Houthi untuk melancarkan serangan di Laut Merah, serta untuk memberikan tekanan politik dan diplomatik agar Houthi mau berunding dengan pemerintah Yaman dan menghentikan konflik.

Namun, strategi AS ini menghadapi beberapa tantangan dan kritik, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa tantangan dan kritik tersebut adalah: Kurangnya partisipasi dan dukungan dari negara-negara regional yang memiliki kepentingan langsung di Laut Merah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Sudan. Negara-negara ini sebelumnya terlibat dalam koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi untuk melawan Houthi di Yaman, namun kemudian mengurangi atau menghentikan keterlibatannya karena alasan politik, ekonomi, atau kemanusiaan. Tanpa dukungan dari negara-negara regional, koalisi AL AS menjadi lemah dan rentan terhadap serangan

Houthi, serta kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah lokal, seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan bantuan kemanusiaan¹².

Selain itu adanya perbedaan kepentingan dan prioritas antara AS dan sekutu-sekutunya dalam koalisi. AS lebih fokus pada ancaman Iran dan Israel, sementara sekutu-sekutunya lebih peduli pada dampak krisis Yaman terhadap kawasan dan dunia. Hal ini menyebabkan ketidaksepakatan dan ketegangan dalam koalisi, terutama terkait dengan tingkat keterlibatan, sasaran, dan aturan operasi militer. Misalnya, Inggris lebih mengutamakan solusi politik dan kemanusiaan daripada solusi militer, sementara Belanda lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan hukum internasional³⁴. Juga adanya kritik dan kecaman dari komunitas internasional, terutama dari PBB, organisasi-organisasi kemanusiaan, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, terhadap operasi-operasi militer koalisi AL AS di Yaman. Kritik dan kecaman ini didasarkan pada tuduhan bahwa operasi-operasi militer tersebut melanggar hukum internasional, menyebabkan korban sipil, merusak infrastruktur, dan memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman. Selain itu, operasi-operasi militer tersebut juga dianggap tidak efektif dalam menghentikan serangan Houthi, melainkan malah memicu eskalasi dan balasan dari pihak Houthi⁵.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini strategi AS dalam menghadapi Yaman yang melaksanakan blokade laut di laut inter-

nasional memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan strategi ini adalah:

1. Menunjukkan komitmen dan solidaritas AS dan sekutu-sekutunya dalam melindungi kepentingan dan nilai-nilai bersama di kawasan Timur Tengah, terutama terkait dengan ancaman Iran dan Israel.
2. Menyediakan dukungan militer dan logistik bagi pemerintah Yaman yang sah, yang berjuang untuk mengembalikan kedaulatan dan stabilitas negaranya dari pemberontak Houthi.
3. Menekan dan mengurangi kemampuan Houthi untuk melancarkan serangan di Laut Merah, yang dapat mengganggu perdagangan dan navigasi global, serta meningkatkan risiko konflik regional dan internasional.

Adapun kekurangan dari strategi ini adalah:

1. Tidak memperhatikan faktor-faktor lokal dan kemanusiaan yang menjadi akar masalah konflik di Yaman, seperti ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, serta penderitaan rakyat Yaman akibat perang dan blokade.
2. Tidak mencari solusi damai dan inklusif yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman, termasuk Houthi, Iran, Arab Saudi, dan PBB, serta menghormati hak-hak dan aspirasi rakyat Yaman.
3. Tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari operasi-operasi militer terhadap lingkungan, infrastruktur, dan masyarakat di Yaman, serta potensi reaksi dan balasan dari Houthi dan Iran.



UU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DI SAHKAN

Ini 6 Poin Penting Yang Harus Diperhatikan

Oleh : Natalina Pakpahan, S.IKom.,



Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) telah berlaku. Pemerintah pusat meneken RUU itu menjadi Undang-undang pada Selasa (4/6/2024). UU KIA disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Dikutip dari detikNews, UU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan terdiri dari 9 bab, 46 pasal, yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam siaran pers resmi mengatakan, RUU ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam mening-

katkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan.

Saat ini ibu dan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, misalnya tingginya angka kematian ibu pada saat melahirkan, angka kematian bayi, dan stunting. Sedangkan kebijakan kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar di berbagai peraturan dan belum mengakomodasi dinamika kebutuhan hukum masyarakat.

Secara latar belakang, UU KIA lahir sebagai inisiatif DPR RI karena melihat perempuan sebagai kelompok yang rentan. Puncaknya pada tahun 2021, di Indonesia ada angka kematian ibu dan anak sebanyak 300/1000 kelahiran. Undang-undang ini diharapkan bisa menjaga hak

hidup keduanya, terutama memastikan perempuan tidak di-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan tetap mendapatkan gaji saat menjalankan fungsi reproduksi. Selain itu, peran parenting juga bukan hanya pada perempuan.

Kendati tujuan dari UU ini baik, beberapa tulisan menyebutkan catatan kritis atas kelahiran UU ini dari perspektif HAM perempuan. Dikutip dari Kompas.id, UU ini minim partisipasi publik secara bermakna dan masif, khususnya dari gerakan perempuan dari sejumlah daerah. Seharusnya, mereka tidak hanya harus dihadirkan, tetapi juga didengarkan dan diadopsi masukan-masukannya. Regulasi yang sehat seharusnya meletakkan sebuah rancangan kebijakan negara menjadi isu publik. Diperdebatkan secara terbuka untuk mendapatkan masukan, terutama kritik yang konstruktif. Ini penting untuk membangun sense of urgency dan rasa memiliki.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait UU KIA ini, beberapa pokok-pokok pengaturan dalam UU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang disepakati oleh Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, perubahan judul dari Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Kedua, penetapan definisi anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, khusus definisi anak pada 1.000 hari pertama kehidupan yaitu kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan berusia 2 tahun. Sedangkan definisi anak secara umum dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketiga, perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Setiap ibu yang bekerja yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya, dan berhak mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Keempat, penetapan kewajiban suami untuk mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti 2 hari.

Kelima, perumusan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase seribu hari pertama kehidupan. Demikian pula tanggung jawab pemerin-

KEBIJAKAN PEMERINTAH

tah pusat dan pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Keenam, pemberian jaminan pada semua ibu dalam keadaan apapun, termasuk ibu dengan kerentanan khusus. Diantaranya ibu berhadapan dengan hukum; ibu di lembaga pemasyarakatan, di penampungan, dalam situasi konflik dan bencana; ibu tunggal korban kekerasan; ibu dengan HIV/AIDS; ibu di daerah tertinggal terdepan dan terluar; dan/atau ibu dengan gangguan jiwa; termasuk juga ibu penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan peraturan perundangan mengenai penyandang disabilitas.

Selain poin penting yang sudah dibahas di atas, definisi Kesejahteraan Ibu dan Anak menurut UU KIA adalah sebuah kondisi yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak dalam keluarga yang bersifat fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal melalui adaptasi, hubungan, pertumbuhan, afeksi, dan pemecahan sesuai fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah harus menjamin Kesejahteraan Ibu dan Anak. Khususnya untuk kaum perempuan yang berkarier. Bahwa perusahaan tidak boleh memecat perempuan tersebut meski memiliki hak cuti selama 6 bulan. Bukan hanya itu, selama cuti 6 bulan, ibu melahirkan juga harus tetap mendapatkan gaji dari tempatnya bekerja. Gaji itu sebanyak 100 persen selama tiga bulan pertama cuti, dan 75 persen pada tiga bulan kedua.

Dalam BAB II Pasal 4 UU KIA disebutkan bahwa ibu harus mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca-melahirkan. Ibu juga memperoleh jaminan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan setelah melahirkan, serta mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau Keluarga.

Lebih dari itu, ibu hamil harus mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Setelah melahirkan dan merawat bayi, ibu juga berhak mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan (parenting), dan tumbuh kembang Anak.(NP)



10 TEMPAT MENAKJUBKAN DI DUNIA

Oleh : Natalina Pakpahan, S.IKom.,

Bumi penuh dengan tempat menakjubkan yang tak terduga. Beberapa di antaranya bisa terbilang 'hidden gem' karena berada di lokasi terpencil yang hanya diketahui masyarakat sekitar. Ketika melihatnya, kebanyakan orang mungkin bisa tidak percaya bila tempat seindah itu ada di dunia. Apa saja? Berikut daftar 10 tempat menakjubkan yang ternyata ada di dunia dikutip dari Detik.com

1. Gua Waitomo Glowworm - New Zealand

Pada tahun 1887, Kepala Suku Maori Tane Tonorau dan penjelajah Inggris Fred Mace menemukan sebuah tempat menakjubkan di New Zealand. Tempat ini adalah gua yang diterangi oleh cahaya biru kehijauan di dalamnya.

Selama beberapa generasi, Suku Maori hanya bisa berbisik-bisik tentang gua tersebut. Namun, tidak ada seorang pun berani masuk jauh ke dalam gua hingga Fred Mace melakukannya dengan rakit dan cahaya lilin.

Hasilnya penampakan menakjubkan terlihat, langi-langit gua dipenuhi batu kapur yang dihuni ribuan makhluk bercahaya. Makhluk ini adalah larva agas jamur karnivora yang disebut *Arachnocampa luminosa* atau cacing pendar. Cacing ini menggunakan bioluminesensi biru untuk menarik mangsa yang kemudian mereka jerat dengan lendir lengket. Meski indah, ternyata hewan menakutkan ini tidak berumur panjang karena tak memiliki sistem pencernaan yang baik.

2. Kota Valparaiso yang bersejarah - Chili

Berada di pesisir Pasifik, Valparaiso merupakan kota pelabuhan internasional terbesar di Amerika Selatan. Kota ini adalah rumah bagi bursa

saham pertama Amerika Latin, punya perpustakaan umum pertama dan tempat kantor surat kabar ber-basa Spanyol tertua di dunia.

Bila mengunjunginya, kamu akan melihat rumah-rumah penuh warna mendominasi di lereng bukur dan gang-gang berbatu. Pada tahun 2003, kawasan Kota Valparaiso dinobatkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

3. Grand Prismatic Spring Yellowstone National Park - Amerika Serikat

Grand Prismatic Spring atau Mata Air Prismatic Besar dipenuhi bakteri yang bernama *Cynobacteria* fotosintetik. Berada di Taman Nasional Yellowstone Amerika Serikat, mata air ini memiliki penampakan yang menakjubkan.

Cynobacteria menghasilkan karotenoid yang dapat menuubah warna. Hal ini juga membantu mikroba bertahan dari panas dan sinar matahari. Semakin mendekati ke tepi mata air suhu akan semakin dingin sehingga warnanya berubah. Hasilnya seperti prisma berwarna cerah yang mengelilingi bagian tengah berwarna biru.

4. Ladang Hidrotermal Dallol - Ethiopia

Dengan perbukitan belerang, sumber air panas yang mendidih dan kolam asam hijau yang menggelak, Ladang Hidrotermal Dallol di Gurun Danakil, Ethiopia seperti mimpi buruk negara tersebut. Bagaimana tidak, wilayah tersebut dialiri air hidrotermal super asin secara terus-menerus dan dipanaskan oleh magma bercampur lumpur, besi, hingga ganggang.

Walaupun menyeramkan, hasil pemanasan magma memberi warna yang fantastis dengan campuran warna kuning, hijau hingga biru. Ladang Hi-

drotermal Dallol terletak hampir 400 kaki di bawah permukaan laut yang juga lubang vulkanik terestrial terendah di dunia dan salah satu tempat terpanas di Bumi dengan suhu rata-rata 34°F sepanjang tahun.

5. Memorial Necrópole Ecumênica - Brasil

Bukan ada di dataran, Memorial Necrópole Ecumênica menjadi pemakaman berbentuk gedung pencakar langit yang unik. Menjulung setinggi langit dengan 32 lantai, membuat pemakaman ini menjadi yang tertinggi dunia. Diketahui, bangunan ini bisa menampung hingga 180 ribu jenazah.

6. Danau Baikal - Rusia

Danau Baikal mungkin merupakan pemecah rekor ekologi terbesar yang belum pernah kamu dengar. Terletak di pegunungan Siberia Rusia, Baikal adalah reservoir air tawar terbesar di dunia berdasarkan volume yang menaandung 20 persen air tawar di seluruh dunia.

Tidak hanya terbesar, danau ini juga diyakini sebagai danau tertua di dunia yakni 25 juta tahun dan terdalam melebihi 5 ribu kaki di beberapa tempat. Dengan air yang termasuk paling jernih di dunia, kamu bisa melihat ke dalam danau karena tampak seperti tansipan.

Tempat ini juga menjadi rumah bagi sekitar 2000 spesies tumbuhan dan hewan. Dua pertiga di antaranya tidak bisa kamu temukan di tempat lain seperti Nerpa yakni anjing laut Baikal yang merupakan satu-satunya anjing laut air tawar di planet ini. Selain itu ada Golomyanka, ikan yang bagian tubuhnya bisa tembus cahaya, tidak memiliki sisik dan dapat menangani perubahan tekanan yang besar. Dengan berbagai hal itu, tak heran jika danau ini dijuluki "Galapagos-nya Rusia".

7. Danau Mendidih - Dominika, Kepulauan Amerika tengah

Danau Mendidih di Dominika secara teknis

menjadi sumber air panas besar dengan suhu mencapai 93 derajat Celcius. Tempat terpanas berada di tengahnya hingga berbentuk awan uap melayang di atas permukaan.

Tidak hanya panas, danau ini juga memiliki kedalaman 200 kaki atau 60 meter. Meski begitu, tidak ada orang yang cukup berani untuk menyelam dan memeriksanya.

8. Forest of Borth (Hutan Kelahiran) - Wales (Inggris)

Pada bulan Januari 2014, badai musim dingin terdasyat terjadi di sepanjang pantai Wales. Badai ini mengungkapkan sisa-sisa hutan prasejarah yang membatu di dekat kota Borth.

Terlihat pohon ek dan pinus yang telah terkubur sekitar 4.600 tahun yang lalu. Hal ini menjadi bukti keberadaan bangsa Atlantis. Menurut legenda Welsh, sebuah kerajaan mitos bernama Centre'r Gwaelod tenggelam di bawah ombak ketika seorang gadis yang kebingungan membiarkan sumur meluap.

9. Desa Prasejarah Tersembunyi - Inggris

Pada tahun 2010, gelombang panas di Inggris mengungkap lusinan situs arkeologi termasuk benteng Romawi dan desa prasejarah. Kemudian pada tahun 2013, pekerja pemeliharaan gagal menyirami bagian Stonehenge dan tiba-tiba rumput kering tersebut memperlihatkan di mana batu-batu kuno pernah ada di sana.

10. Pegunungan Cermin Rjukan - Norwegia

Selama enam bulan dalam setahun, kota Rjukan di Norwegia selalu berada dalam bayang-bayang pegunungan di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, seorang seniman pada tahun 2013 memasang cermin di lereng gunung. Sehingga matahari bisa menyinari alun-alun kota dari pancaran cermin. (FN)





NEGARA-NEGARA YANG TIDAK PUNYA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN INDONESIA

Oleh: Fauziah Nurunnajmi, S.E.,

Hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh negaranya.

Diplomasi memegang peran penting dalam membangun hubungan antarnegara. Melalui diplomasi dan kerjasama internasional, negara-negara dapat bekerja bersama untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong keadilan sosial di seluruh dunia.

Dikutip dari Kemlu.go.id, Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory*. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Tengah dan Timur).

Namun, ada kalanya suatu negara tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dengan berbagai alasan. Hal ini menjadi sorotan penting ketika menyangkut Indonesia yang menerapkan prinsip luar negeri bebas aktif dan memiliki sejarah panjang dalam menjalin kerja sama diplomatik dengan berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan hubungannya dengan

negara lain.

Sejauh ini, terdapat tiga negara yang hingga saat ini masih belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, yaitu Taiwan, Kosovo, dan Israel. Apa alasan Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan ketiga negara itu?

Taiwan

Taiwan adalah negara yang terletak di sebelah timur China. Negara ini telah memisahkan diri dari Tiongkok daratan dan tidak mau dianggap sebagai bagian dari Republik Rakyat China (RRC). Meskipun demikian, RRC memandang Taiwan sebagai sebuah provinsi yang memberontak dan masih dianggap sebagai bagian dari wilayah China. Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung Prinsip Satu China (*One China Policy*) yang dipegang oleh pemerintah China. Oleh sebab itu, Indonesia hanya mengakui RRC sebagai pemerintahan sah di China dan tidak memberikan pengakuan resmi kepada Taiwan sebagai entitas negara yang memiliki kedaulatan.

Sampai saat ini, PBB tidak menerima Taiwan sebagai anggota meskipun Taiwan berulang kali mengajukan keanggotaannya sebagai negara merdeka. Hal ini membuat sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, juga belum mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Karenanya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan kebijakan luar negeri bebas aktif yang menjadi dasar dalam menjalankan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada Indonesia untuk menentukan bagaimana berhubungan dengan negara-negara di dunia. Walaupun belum mengakui kedaulatan Taiwan, Indonesia telah menjalin hubungan perdagangan dan ekonomi dengan negara itu sejak tahun 1960-an.

Kosovo

Kosovo terletak di wilayah Balkan, Eropa Tenggara. Kosovo berbatasan dengan Montenegro di sebelah barat, Serbia di sebelah utara dan timur, Makedonia Utara di sebelah tenggara, dan Albania di sebelah selatan. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008 dan ibu kotanya adalah Pristina. Namun, hingga saat ini, masih ada kontroversi mengenai status hukum deklarasi tersebut.

Perlu diketahui bahwa Kosovo dulunya merupakan provinsi otonom dalam Republik Federal Yugoslavia yang kemudian menjadi bagian dari Republik Federal Serbia dan Montenegro. Setelah berakhirnya Perang Kosovo pada 1999, Kosovo menjadi wilayah protektorat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikelola oleh Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo (UNMIK). Setelah beberapa tahun berlalu, Kosovo memproklamasikan kemerdekaannya pada 2008 yang memicu debat dan kontroversi tentang statusnya di arena internasional. Kosovo dianggap telah memproklamasikan kemerdekaannya secara sepihak tanpa persetujuan dari Serbia sebagai negara induknya.

Oleh karena itu, Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Keputusan ini didasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara anggota PBB, termasuk Ser-

bia. Sementara itu, Kosovo belum menjadi anggota PBB sehingga statusnya masih dalam proses perdebatan dan belum diakui secara universal sebagai negara berdaulat.

Mengutip laman Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia tetap konsisten memberikan dukungan kepada Serbia, yang menjadi negara sendiri pada 21 Mei 2006. Hal ini dilakukan atas dasar hubungan bilateral Indonesia dan Serbia yang berlangsung baik sejak masih berdirinya Republik Federasi Sosialis Yugoslavia tahun 1956, yang saat itu terdiri dari 6 negara bagian, yaitu Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, dan Makedonia.

Israel

Sejak proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah dengan konsisten mematuhi prinsip-prinsip konstitusi UUD 1945 yang menekankan pentingnya mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini terkandung dalam kalimat "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" di dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal ini menjadi dasar utama mengapa Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina mencapai kemerdekaannya. Sebagai gantinya, Indonesia memberikan dukungan kuat kepada perjuangan kemerdekaan Palestina. Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, Indonesia tetap konsisten dalam mengupayakan terwujudnya perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan prinsip kemanusiaan. Indonesia memandang bahwa mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka adalah langkah yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan upaya menciptakan perdamaian global didasarkan pada keadilan sosial. Dengan demikian, sikap dan posisi Indonesia tetap solid dalam mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. (NP)





